

DAFTAR PUSTAKA

Bandur, Agustinus.2016. Penelitian Kualitatif- Metodologi/Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Diatmika. 2013."*Penerapan Akuntansi Pajak atas PP NO. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu*". **Jurnal Akuntansi Profesi**. Vol. 3 No. 2

Direktorat Jendral Pajak.2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

(<https://www.pajak.go.id>)

Direktorat Jendral Pajak.2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

(<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun2018>)

Hartono, Jogiyanto.2018. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.Yogyakarta: Andi.

Hutomo, Sigit.2018. Terampil Pajak Penghasilan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi.

<https://www.kemenkeu.go.id>, 14 November 2019

Maulidia alfi Lofiana Sa'diya, Siti Ragil Handayani, I. E. (2016). No Title. 10(1), 1-7.

Nangoi, F. H. & G. B. (2013). Umkm terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Manado. 3(46), 787-789.

Resmi, Siti.2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Safrina, N., Soehartono, A., Baruna, A., & Noor, S. (2018). P-23 Kajian Dampak Penerapan PPh final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka Pencapaian Target

Penerimaan Pajak Tahunan 2018 Assessment of the Impact of the 0,5% final PPh Implementation on UMKM in the Framework of Tax Receipt or Target 2018.

Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). (23), 1–7.

Undang- undang nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx#:~:text=Kecil%2C%20dan%20Menengah-,Undang%20Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008,Usaha%20Mikro%2C%20Kecil%2C%20dan%20Menengah&text=Bab%20VI%20Pasal%2020%20mengatur,teknologi%20dan%20kelestarian%20lingkungan%20hidup>).

Undang- undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>)

wahyu suryani, maslichah, dan junaidi. (2019). E-JRA Vol. 08 No. 02 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. 08(02), 32–41.